

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN AUDITOR EKSTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Muhammad Hafidz Asyari¹, Izza Khoirunisa², Kasam Sunaryo³, Tri Pujadi Susilo^{4*}

^{1 2 3 4} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Bakrie,
Jakarta, Indonesia

E-mail: ² tripujadi.tps@gmail.com

^{*}[*corresponding author](#)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh implementasi sistem pengendalian intern pemerintah dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor eksternal terhadap kualitas laporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah Operator Laporan Keuangan di Kementerian Keuangan dengan jumlah 112 orang. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dan menghasilkan ukuran sampel sebanyak 64 responden. Data di analisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan perangkat lunak SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem pengendalian intern pemerintah dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor eksternal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Auditor Eksternal, Kualitas Laporan Keuangan, Kementerian Keuangan

ABSTRACT

The objective of this research is to examine the effect of implementation of government internal control system and practice of audit results follow up to financial statement quality. Population used in this research is Financial Statement Operators in Ministry of Finance totaling 112 persons. Purposive sampling method was used in this research and resulting in sample size of 64 respondent. Data analysis performed using multiple linear regression analysis and processed with SPSS version 25. The results showed that implementation of government internal control system and practice of audit results follow up has positive effect to financial statement quality.

Keywords: *Implementation of Government Internal Control System, Practice of Audit Results Follow Up, Financial Statement Quality, Ministry of Finance*

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, Kementerian Keuangan ditunjuk sebagai institusi yang

menjalankan peran sebagai manajer keuangan dalam pemerintahan Indonesia atau yang selama ini dikenal dengan *Chief Financial Officer* (CFO). Berdasarkan undang-undang tersebut, CFO

menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) dan Pengguna Anggaran (PA). Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan peran sebagai BUN, Kementerian Keuangan menyusun laporan pertanggungjawaban yang biasa disebut dengan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mengacu pada peraturan tersebut, laporan keuangan didefinisikan sebagai “laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. Berdasarkan peraturan tersebut, terdapat karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi oleh entitas pelaporan untuk menyajikan informasi yang berkualitas. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan dari penyusunan laporan keuangan tersebut. Karakteristik kualitatif yang terdapat dalam Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Keempat karakteristik tersebut merupakan prasyarat normatif yang dibutuhkan agar

laporan keuangan instansi pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

Dengan banyaknya rekomendasi yang belum sesuai dengan rekomendasi BPK RI, kualitas, dan ketepatan penyajian laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat belum memenuhi ekspektasi para pengguna laporan keuangan. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa walaupun jumlah opini WTP yang didapatkan oleh K/L semakin banyak, belum tentu sebuah laporan keuangan bebas dari salah saji. Harapannya, dengan semakin tingginya angka tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan terutama di Pemerintahan Pusat, kualitas laporan keuangan dapat sesuai dengan standar yang berlaku.

Sebagai salah satu bagian dari pelaporan keuangan Pemerintah Pusat, fenomena pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi topik yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK RI atas LK BA015 yang setiap tahunnya masih ditemukan kelemahan baik dalam SPI maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, walaupun jika diukur secara materialitas salah saji, BPK menyimpulkan LK BA015 layak

mendapatkan opini WTP sejak tahun 2013. Perjalanan LK BA015 mendapatkan opini WTP dimulai sejak tahun 2004 dimana saat itu LK BA015 masih mendapatkan opini TMP. Di tahun 2008, LK BA015 pertama kali mendapatkan opini WDP dan berlangsung sampai dengan tahun 2010. Pada tahun 2011 hingga sekarang Kementerian Keuangan selalu mendapatkan opini WTP atas LK BA015.

Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan berasal dari penelitian Herawati (2014), Kiranayanti dan Erawati (2016), dan Kustiawan (2016). Masing-masing dari peneliti tersebut membuat kesimpulan yang selaras bahwa terdapat pengaruh signifikan antara unsur- unsur sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan secara simultan. Dengan kata lain, semakin baik penerapan pengendalian intern maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan.

Selanjutnya, untuk penelitian terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor eksternal merujuk pada penelitian Sari, dkk (2015) dan Tresnawati dan Apandi (2016). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin banyak rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti

sesuai rekomendasi akan meningkatkan kualitas laporan keuangan K/L.

Berdasarkan perumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menguji; 1) pengaruh implementasi sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan; 2) pengaruh pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor eksternal terhadap kualitas laporan keuangan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Stewardship Theory

Stewardship theory adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama untuk kepentingan organisasi. Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal. Selain itu, *steward* berkomitmen tidak akan meninggalkan organisasinya karena *steward* akan berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori *stewardship* didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak

dengan cara terbaik pada *principal*-nya (Donaldson dan Davis, 1989, 1991).

Kontrak hubungan antara *principals* dengan *stewards* didasari dengan kepercayaan kolektif sesuai dengan tujuan organisasi. Terlebih lagi, pemerintah memiliki akses langsung terhadap informasi dibandingkan masyarakat yang mana dapat menimbulkan masalah *stewardship*. Maka dari itu, pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan negara.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI dimaksudkan untuk mengurangi asimetri informasi yang timbul antara masyarakat dan pemerintah. Melalui hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan di Kementerian Keuangan, diharapkan kualitas dan kewajaran dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Keuangan semakin optimal. Melalui hasil pemeriksaan tersebut pula, secara tidak langsung masyarakat dapat melihat baik atau tidaknya pengelolaan keuangan oleh Kementerian Keuangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pengendalian intern memiliki pengertian yang luas dan dalam praktiknya di seluruh dunia, kegiatan yang menjadi cakupannya pun cukup bervariasi karena

disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi.

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) adalah salah satu lembaga internasional yang telah diakui dan berdedikasi dalam menyediakan *framework* dan pedoman dalam pengelolaan risiko, pengendalian intern, dan pencegahan *fraud*. Pada dasarnya, COSO *framework* membantu manajemen, *Board of Directors*, pemangku kepentingan, dan pihak lainnya dalam mengimplementasikan pengendalian intern. Produk yang telah dihasilkan oleh COSO antara lain *Internal Control – Integrated Framework* (1992) dan *Enterprise Risk Management – Integrated Framework* (1994). Dalam perkembangannya COSO telah mengeluarkan kerangka IC terbaru yaitu *Internal Control – Integrated Framework* (2017) untuk menggantikan kerangka IC yang lama.

Adapun komponen-komponen sistem pengendalian intern menurut COSO antara lain:

1. *Control environment* (lingkungan pengendalian)
Merupakan tanggung jawab manajemen puncak untuk menyatakan dengan jelas struktur, peraturan, nilai-

nilai organisasi, dan kegiatan tidak etis yang tidak dapat ditoleransi.

2. *Risk assessment* (penilaian risiko)
Organisasi harus mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menciptakan risiko bisnis dan harus menentukan bagaimana mengelola risiko tersebut.
3. *Control activities* (kegiatan pengendalian)
Untuk mengurangi terjadinya kecurangan, manajemen harus merancang kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi risiko tertentu yang dihadapi organisasi.
4. *Information and communication* (informasi dan komunikasi)
Sistem pengendalian intern harus didukung dengan informasi yang relevan dan tepat waktu serta dikomunikasikan kepada seluruh pegawai organisasi dari atas hingga bawah.
5. *Monitoring* (pemantauan)
Sistem pengendalian intern harus dipantau secara berkala. Apabila terdapat kekurangan yang signifikan, harus segera dilaporkan kepada manajemen puncak maupun dewan komisaris.

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan

Menyusun laporan keuangan merupakan salah satu tanggung jawab utama dan bentuk akuntabilitas manajemen di setiap organisasi, baik yang *profit oriented* maupun non-profit, karena informasi tersebut memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan. Laporan Keuangan, berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2003, merupakan laporan pertanggungjawaban anggaran negara dan daerah (APBN dan APBD). Oleh karena itu, pelaporan keuangan baik di sektor publik maupun privat harus dilakukan dengan andal.

Kementerian Keuangan, sebagai institusi yang menjalankan tugas sebagai Bendahara Umum Negara, memiliki perangkat pengendalian intern melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Berdasarkan peraturan tersebut, Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) didefinisikan sebagai pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun

sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan yang dimaksud meliputi Laporan

Penilaian PIPK yang dilaksanakan oleh manajemen atau disebut juga Penilaian Mandiri dipengaruhi oleh integritas manajemen. Ketidakteragaman integritas manajemen dapat menghasilkan subjektivitas penilaian PIPK. Oleh karena itu, diperlukan revidi oleh APIP yang merupakan pihak eksternal manajemen untuk memastikan hasil penilaian PIPK memenuhi kualitas standar yang diharapkan serta objektivitas penilaiannya dapat ditingkatkan.

Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Auditor Eksternal

BPK RI menerbitkan rekomendasi atas temuan-temuan pemeriksaan selama masa pemeriksaan dan rekomendasi tersebut disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan masing-masing instansi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 rekomendasi didefinisikan sebagai saran pemeriksa dari hasil pemeriksaan, yang ditujukan kepada pihak berwenang agar dilakukan tindakan korektif sehingga secara teknis, rekomendasi yang diterima oleh instansi wajib untuk ditindaklanjuti.

Pemantauan tindak lanjut rekomendasi oleh instansi pemerintah dilakukan oleh BPK RI sebagaimana tercantum pada Peraturan Kepala BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa “LHP ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola keuangan negara selaku pihak yang bertanggung jawab sesuai kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPK memantau secara periodik pelaksanaan tindak lanjut atas LHP dan menyampaikan hasil pemantauannya kepada lembaga perwakilan, dan pihak yang bertanggung jawab. Pemeriksa mempertimbangkan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya yang berhubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan (Paragraf 41 dan 42).

Laporan hasil pemeriksaan juga menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan audit oleh BPK. Pemantauan tersebut bertujuan untuk mengawasi perbaikan-perbaikan yang dilakukan instansi atas temuan-temuan audit pada periode sebelumnya. Pemantauan tersebut memberikan gambaran seberapa jauh rekomendasi BPK yang telah dilaksanakan. Dengan adanya tindak lanjut sesuai rekomendasi maka terdapat upaya perbaikan yang dapat

menghindari kesalahan yang sama dan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Mardiasmo (2009) mengungkapkan bahwa dalam tahap penindaklanjutan akan melibatkan auditor, auditi dan pihak lain yang berkompeten. Tahap penindaklanjutan didesain untuk memastikan/memberikan pendapat apakah rekomendasi yang diusulkan oleh auditor sudah diimplementasikan. Rekomendasi yang diberikan oleh auditor perlu segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang agar perbaikan kinerja dapat sesegera mungkin dilaksanakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap penindaklanjutan antara lain dasar pelaksanaan *follow-up*, pelaksanaan revaluasi *follow-up*, batasan *follow-up*, implementasi rekomendasi, dan pemeriksaan kembali secara periodik.

Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Informasi bernilai jika dapat mengurangi ketidakpastian pengguna ketika berada dalam situasi keputusan tertentu. Definsi kualitatif sulit diterapkan, karena itu perlu mempertimbangkan pendekatan kuantitatif salah satunya *information economic approach*. Nilai informasi dipengaruhi oleh kualitas informasi yang melekat pada informasi

yaitu relevan, akurat, tepat waktu, ringkas, jelas, dapat dikuantifikasi dan konsisten (Fransiska 2015). Kriteria kebermanfaatan/kualitas informasi terdiri dari kualitas primer dan kualitas sekunder. Kualitas primer meliputi keberpautan/relevansi (nilai balikan, nilai prediktif, ketepatanwaktu) dan keterandalan/reliabilitas (keterujian, ketepatan penyimbolan). Sedangkan kualitas sekunder meliputi keterbandingan, konsistensi, dan kenetralan (FASB, 2010). Karakteristik kualitatif pada FASB diadopsi dalam Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kustiawan (2016) dan Mokoginta dkk. (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, semakin tingginya kualitas sistem pengendalian intern pemerintah maka kualitas dari sebuah laporan keuangan pun akan semakin tinggi.

Hasil penelitian Munawar dkk. (2016) menyatakan bahwa temuan atas kelemahan

sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Lebih lanjut, Herawati (2014) menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan terhadap kualitas laporan keuangan secara simultan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa semakin rendah permasalahan sistem pengendalian intern maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah. Sebaliknya, apabila semakin banyaknya permasalahan sistem pengendalian internal maka akan semakin rendah kualitas laporan keuangan pemerintah. Maka dari itu, hipotesisnya adalah:

H1 : Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Pengaruh Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Auditor Eksternal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Martani dan Liestiani (2008) serta Kustiawan (2016) membuktikan bahwa temuan pemeriksaan auditor eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan

keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Semakin banyaknya temuan pemeriksaan, pemerintah daerah akan berupaya menyelesaikan rekomendasi BPK RI dalam rangka koreksi sehingga berdampak pada peningkatan pengungkapan laporan keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian Arifin dan Fitriasari (2014) yang menemukan bahwa jumlah temuan pemeriksaan pada tahun sebelumnya dan pada periode yang sama tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan. Hal ini disebabkan K/L tidak maksimal dalam melakukan tindak lanjut rekomendasi dari BPK RI atas temuan pemeriksaan (Arifin dan Fitriasari, 2014).

Tindak lanjut yang dilakukan oleh instansi akan memperbaiki permasalahan-permasalahan sehingga instansi dapat meningkatkan kinerjanya dalam mengelola keuangan negara dengan lebih baik lagi. Selain itu dengan adanya perbaikan akan mengurangi temuan yang berulang yang dapat menjadi pertimbangan pemeriksa dalam menentukan kualitas laporan keuangan. Sehingga apabila instansi menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan maka kualitas laporan keuangan akan semakin tinggi. Sebaliknya apabila hasil pemeriksaan tidak ditindaklanjuti maka

kemungkinan kualitas laporan keuangan akan semakin rendah. Maka dari itu, hipotesisnya adalah:

H2 : Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh operator penyusun laporan keuangan pada satuan kerja pusat dan satuan kerja di Kementerian Keuangan yang berada di DKI Jakarta berjumlah 112 orang. Hal ini berdasarkan data jumlah satuan kerja yang ada di DKI Jakarta, baik kantor pusat, kantor wilayah, maupun kantor pelayanan.

Berdasarkan hasil perhitungan pengambilan sampel, maka diketahui jumlah sampel responden dari penelitian ini sebanyak 53 sampel. Metode penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah:

1. Pegawai Kementerian Keuangan dengan status PNS di DKI Jakarta;
2. Berstatus aktif bekerja; dan
3. Memiliki peran/pekerjaan sebagai operator penyusun laporan keuangan.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, data yang digunakan adalah data primer. Data primer diperoleh dari jawaban responden atas kuesioner yang diberikan kepada responden sesuai dengan sampel yang telah dipilih. Selain itu, dalam penulisan ini, penulis juga melakukan telaah atas literatur, penulisan terdahulu, dan teori untuk membentuk landasan teori dan penentuan atribut penulisan berupa jurnal riset, tesis, dan buku-buku yang mendukung.

Definisi Operasionalisasi Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu; 1) variabel bebas (*independent variable*) yaitu implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (X_1) dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor eksternal (X_2) dan variabel terikat (*dependent variable*) yaitu Kualitas Laporan Keuangan (Y). Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan didefinisikan sebagai “laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh

suatu entitas pelaporan". Pada peraturan tersebut, selanjutnya ditentukan agar laporan keuangan memiliki kualitas yang baik, laporan keuangan wajib memenuhi empat karakteristik kualitatif, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Untuk variabel implementasi sistem pengendalian intern pemerintah, definisi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan. Sistem pengendalian intern didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Variabel selanjutnya yaitu pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor eksternal didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK RI untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat. Definisi tersebut sesuai dengan Peraturan Kepala BPK RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Tindak

Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan pada bulan Juli s.d. Agustus 2019 dengan menyebarkan kuesioner secara daring. Sesuai dengan perhitungan menggunakan rumus slovin, untuk populasi sebanyak 112 orang, diperlukan sampel dengan jumlah minimal sebanyak 53 responden. Berdasarkan rekapitulasi hasil pengisian responden, dari 70 kuesioner terdapat 64 kuesioner yang dapat diolah sesuai dengan petunjuk pengisian kuesioner. Merujuk pada data tersebut, maka penelitian ini menggunakan data pada 64 kuesioner tersebut untuk dilakukan pengujian selanjutnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden tersebar di 11 unit Eselon I Kementerian Keuangan dengan responden terbanyak berasal dari Inspektorat Jenderal dan responden dengan jumlah paling sedikit berasal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Ditinjau dari sebaran responden, mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah sebanyak 51 responden atau 79,7%, sedangkan

responden dengan jenis kelamin wanita berjumlah sebanyak 13 atau 20,3%.

Selanjutnya analisis atas demografi responden dilakukan berdasarkan usia. Operator laporan keuangan yang mengisi kuesioner didominasi oleh responden dengan kelompok usia 20-30 tahun dengan total sebanyak 50 responden (78,13%). Untuk responden dengan kelompok usia 31-40 tahun tercatat sebanyak 9 responden (14,06%). Sedangkan responden dengan kelompok usia >40 tahun tercatat paling sedikit mengisi kuesioner dengan total sebanyak 5 responden (7,81%).

Analisis demografi responden selanjutnya dilakukan berdasarkan masa kerja. Responden dengan masa kerja 5-10 tahun mendominasi lebih dari separuh dari jumlah total responden yaitu sebanyak 33 responden (51,56%). Sedangkan responden dengan masa kerja >21 tahun tercatat paling sedikit mengisi kuesioner dengan jumlah sebanyak 5 responden (7,81%).

Terakhir, dilakukan analisis demografi responden berdasarkan pendidikan responden. Responden yang mengisi kuesioner didominasi oleh operator laporan keuangan dengan tingkat

pendidikan terakhir D3 Akuntansi sebanyak 34 responden (53,13%). Untuk operator laporan keuangan dengan tingkat pendidikan terakhir S1/DIV Akuntansi berjumlah 23 responden (35,94%) dan S2 sejumlah 7 responden (10,94%). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Hasil dari uji statistik deskriptif berhubungan dengan metode pengelompokkan, *summarizing data*, dan penyajian data yang lebih informatif. Analisis deskriptif ditunjukkan untuk memberikan gambaran atau deskripsi data dari variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan (Y) serta variabel independen yaitu Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X_1) dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Auditor Eksternal (X_2). Dari 64 kuesioner yang diolah pada penelitian ini, penulis mengolah data tersebut menggunakan statistik deskriptif dengan menggunakan aplikasi SPSS. Berikut analisis statistik deskriptif responden dari penelitian ini.

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Pendidikan Terakhir	N	Min	Max	Mean	Std Dev
Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X ₁)	64	24	40	34,72	4,157
Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Auditor Eksternal (X ₂)	64	12	20	16,98	2,333
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	64	27	45	39,22	3,986

Sumber: Data primer diolah.

Hasil Uji Validitas

Uji validitas yaitu suatu pengujian untuk mengetahui valid tidaknya pertanyaan dan pernyataan yang ada pada kuesioner, mengetahui apakah pertanyaan dan pernyataan tersebut benar-benar dapat digunakan untuk mengukur variabel yang diinginkan. Pengujian ini dilakukan dengan kriteria dikatakan valid apabila nilai r hitung $>$ r tabel. Adapun nilai r tabel dengan $n=64$ dan tingkat keyakinan 0,05 adalah 0,2461.

Hasil uji validitas untuk indikator-indikator pernyataan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator terkait variabel implementasi sistem pengendalian intern pemerintah terdiri atas delapan pernyataan, seluruh pernyataan tersebut dikatakan valid karena nilai r hitung $>$ r tabel.
2. Indikator terkait variabel pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor eksternal terdiri atas empat pernyataan,

seluruh pernyataan tersebut dikatakan valid karena nilai r hitung $>$ r tabel.

3. Indikator terkait variabel kualitas laporan keuangan terdiri atas sembilan pernyataan, seluruh pernyataan tersebut dikatakan valid karena nilai r hitung $>$ r tabel.

Berdasarkan hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat konsistensi dalam pernyataan-pernyataan untuk setiap indikator sehingga membentuk konstruk dari setiap variabel. Oleh karena itu, indikator tersebut akan di uji reliabilitas untuk mendapatkan keandalan terukur.

Hasil Uji Reliabilitas

Instrumen pengujian selanjutnya yang digunakan dalam penelitian adalah uji reliabilitas atau keandalan untuk mengukur variabel penelitian. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau andal jika jawaban-jawaban responden cenderung konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Cronbach's Coefficient Alpha* dengan aplikasi SPSS 25. *Cronbach Coefficient Alpha* dapat diartikan sebagai hubungan positif antara item/pertanyaan satu dengan yang lainnya. Dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas ini adalah sebagai berikut:

1. Apabila *Cronbach's Coefficient Alpha* $\geq 0,700$ maka pernyataan dalam

kuisisioner layak digunakan (*construct reliable*).

2. Apabila *Cronbach's Coefficient Alpha* $\leq 0,700$ maka pernyataan dalam kuisisioner tidak layak digunakan (*construct unreliable*).

Adapun hasil uji reliabilitas berdasarkan data sampel yang diperoleh adalah sebagai berikut.

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Standar Reliabilitas	Keterangan
Pengendalian Intern (X ₁)	0,906	0,700	Reliabel
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Auditor Eksternal (X ₂)	0,861	0,700	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,825	0,700	Reliabel

Sumber: Data primer diolah.

Berdasarkan pengujian terhadap ketiga variabel dikatakan reliabel karena seluruh nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,700$, yaitu implementasi sistem pengendalian intern pemerintah sebesar 0,906, pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor eksternal 0,871, dan kualitas laporan keuangan sebesar 0,818. Dengan kata lain, dapat disimpulkan indikator-indikator yang digunakan pada variabel dapat dipercaya atau diandalkan sebagai alat ukur variabel.

Hasil Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan analisis statistik *One-Sample Kolmogrov-Smirnov* (K-S) menggunakan aplikasi SPSS 25. Jika hasil Uji K-S menunjukkan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih besar dari $\alpha = 0,05$ maka residual regresi tersebut berdistribusi normal. Adapun pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS 25 menghasilkan *output* sebagai berikut.

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas (K-S)

		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		64
<i>Normal Parameters</i>	<i>Mean</i>	0,0000000
	<i>Std Deviation</i>	2,50429244
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,614
	<i>Positive</i>	0,611
	<i>Negative</i>	-0,614
<i>Test Statistics</i>		0,614
<i>Asymp. Sig. (2 tailed)</i>		0,225

Sumber: Data primer diolah.

Berdasarkan uji yang telah dilakukan, hasil menunjukkan bahwa nilai signifikansi residual *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,225 yang berarti lebih besar dari taraf signifikansi sebesar 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal dan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji multikolinearitas pada penelitian dilakukan dengan matriks korelasi. Pengujian ini menekankan pada nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Batas nilai yang menjadi dasar pengambilan keputusan adalah lebih besar dari 0,10 untuk nilai *tolerance* dan lebih kecil dari 10,00 untuk nilai *VIF*. Hasil pengolahan data melalui aplikasi SPSS 25 menghasilkan *output* sebagai berikut.

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

<i>Model</i>	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
(Constant)		
X1	0,376	2,659
X2	0,376	2,659

Sumber: Data primer diolah.

Data pengujian menunjukkan bahwa nilai *tolerance* pada variabel independen tidak ada yang memiliki nilai kurang dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor*

(*VIF*) tidak ada yang memiliki nilai lebih dari 10,00. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain adalah tetap atau disebut homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak heteroskedastisitas.

Pengujian terhadap heteroskedastisitas menggunakan uji *Glejser* untuk

mendeteksi terjadinya heteroskedastisitas. Hasil dari uji *Glejser* akan memunculkan nilai signifikansi (*sig*) yang dapat dibandingkan dengan nilai *alpha* (α) sebesar 5%

(0.05). Apabila nilai $Sig > \alpha$, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya jika nilai $Sig < \alpha$, maka terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengolahan data melalui aplikasi SPSS 25 menghasilkan *output* sebagai berikut.

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

<i>Model</i>	<i>Unstandarized Coefficients</i>		<i>Standarized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
(<i>Constant</i>)	1,752	1,761		0,995	0,324
X1	0,111	0,081	0,280	1,367	0,177
X2	-0,221	0,145	-0,312	-1,521	0,133

Dependent Variable: Abs_Res Sumber: Data primer diolah.

Berdasarkan data hasil uji *glejser* dapat disimpulkan bahwa di dalam analisis regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, dengan nilai signifikansi (*p-value*) variabel implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (X_1) sebesar 0,177 dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor eksternal (X_2) sebesar 0,133. Hasil tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai ABS_RES, hal tersebut

dikarenakan nilai probabilitas signifikansinya yang diatas 0.05 atau 5%.

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan dengan tujuan untuk menilai kemampuan model untuk melakukan prediksi dengan mempertimbangkan penggunaan variabel dependen (Y) dan variabel independen (X_1 dan X_2). Berdasarkan hasil pengujian data menggunakan aplikasi SPSS 25, diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>t hitung</i>	<i>Sig</i>	<i>Keterangan</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>			
	<i>(Constant)</i>	13,229			
X1	0,502	0,126	3,991	.000	Signifikan
X2	0,504	0,224	2,250	.028	Signifikan

Sumber: Data primer diolah.

Merujuk pada hasil pengolahan data pada tabel di atas, dapat disusun persamaan matematis sebagai berikut.

$$Y = 13,229 + 0,502X_1 + 0,504X_2 + \varepsilon_t$$

Keterangan:

X_1 = Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

X_2 = Pelaksana Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Auditor Eksternal
 Y = Kualitas Laporan Keuangan
 α = Konstanta
 β = Koefisien
 ε = Tingkat Kesalahan

1. Konstanta 13,229 mengindikasikan bahwa jika implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (X_1) dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor eksternal (X_2) tidak dilakukan maka kualitas laporan keuangan akan bernilai 13,229.
2. Nilai koefisien regresi variabel implementasi sistem pengendalian intern pemerintah sebesar 0,502 berarti implementasi sistem pengendalian intern pemerintah memiliki hubungan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Setiap peningkatan

implementasi sistem pengendalian sebesar 1 satuan maka kualitas laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,502 satuan.

3. Nilai koefisien regresi untuk variabel pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor eksternal sebesar 0,504 berarti pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor eksternal memiliki hubungan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Setiap peningkatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor eksternal sebesar 1 satuan maka kualitas laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,504 satuan.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Uji Koefisien Determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen (Y), dengan asumsi sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Dalam penelitian ini,

besarnya pengaruh tersebut dijelaskan oleh nilai *adjusted R²* untuk mengevaluasi model regresi penelitian yang paling baik.

Hasil uji koefisien determinasi menggunakan aplikasi SPSS 25 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R²</i>	<i>Adjusted R²</i>	<i>Std Error</i>	<i>DW</i>
1	0,778	0,605	0,592	2,545	2,002

Sumber: Data primer diolah.

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa nilai *adjusted R²* adalah 0,592 yang berarti sebesar 59,2% variabel dalam kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (X_1) dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor eksternal (X_2). Sedangkan sisa dari hasil hitung (100% - 59,2% = 40,8%) dijelaskan oleh sebabsebab lain diluar variabel yang tidak digunakan dalam penelitian.

Hasil Uji t (Parsial)

Uji statistik t (Parsial) dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan adalah dengan membandingkan antara nilai probabilitas dari t-hitung dengan taraf signifikansi 5%. Kaidah pengambilan keputusan adalah:

1. Jika nilai probabilitas < 0,05 atau t hitung > t tabel maka hipotesis diterima, artinya secara parsial variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai probabilitas > 0,05 atau t hitung < t tabel maka hipotesis ditolak, artinya secara parsial variabel independen tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Untuk mencapai keputusan apakah menerima atau menolak H_0 , terlebih dahulu harus merujuk pada nilai t tabel yang digunakan. Nilai t tabel tergantung pada besarnya df (*degree of freedom*) dan tingkat signifikansi yang digunakan. Dengan tingkat signifikansi sebesar 5% dan nilai df sebesar $n-k = 64-3 = 61$ diperoleh nilai t tabel sebesar 1,99962. Hasil pengujian menggunakan aplikasi SPSS 25 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 8 Hasil Uji t (Parsial)

Variabel	t hitung	t tabel	Signifikansi	Keterangan
Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	3,991	1,99962	.000	Signifikan
Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal	2,250	1,99962	.028	Signifikan

Sumber: Data primer diolah.

Berdasarkan data pada tabel diatas, maka dapat dijelaskan pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial, sebagai berikut.

1. Merujuk pada tabel 8, diketahui bahwa nilai t hitung untuk variabel implementasi sistem pengendalian intern pemerintah adalah sebesar 3,991. Jika dibandingkan dengan nilai t tabel yang sebesar 1,99962, maka nilai t hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai t tabel sehingga hipotesis diterima dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel implementasi sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Merujuk pada tabel 8 diketahui bahwa nilai t hitung untuk variabel pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor eksternal adalah sebesar 2,250. Jika dibandingkan dengan nilai t tabel yang

sebesar 1,99962, maka nilai t hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai t tabel sehingga hipotesis diterima dengan tingkat signifikansi sebesar 0,028 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, diketahui bahwa H1 yang diajukan diterima. Pernyataan tersebut berdasarkan nilai variabel independen pertama dalam penelitian ini, yaitu implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (X_1) memiliki nilai t hitung ($3,991 > t \text{ tabel } (1,99962)$), tingkat signifikansi pada model regresi sebesar $0,00 < \text{signifikansi } 0,05$. Hal tersebut mengindikasikan bahwa variabel pengendalian intern secara parsial berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Dengan demikian, apabila implementasi sistem pengendalian intern pemerintah meningkat maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan meningkat secara signifikan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua, diketahui bahwa H2 yang diajukan juga diterima. Pernyataan tersebut berdasarkan nilai variabel independen kedua dalam penelitian ini, yaitu pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor eksternal (X_2) memiliki nilai t hitung ($2,250$) > t tabel ($1,99962$), tingkat signifikansi pada model regresi sebesar $0,028 <$ signifikansi $0,05$. Hal tersebut mengindikasikan bahwa variabel pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor eksternal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Dengan demikian, apabila pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor eksternal meningkat maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan meningkat secara signifikan.

Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil kuesioner yang diperoleh dari responden menunjukkan bahwa untuk

variabel implementasi sistem pengendalian intern pemerintah, skor kumulatif maksimal yang diperoleh adalah 40 dan skor minimal yang diperoleh adalah 24 dengan skor rata-rata kumulatif sebesar 34,72. Hasil statistika deskriptif tersebut menguatkan hasil uji hipotesis (H1), yang menunjukkan bahwa rata-rata responden memberi jawaban positif atas pernyataan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah mendukung kualitas laporan keuangan.

Pelaksanaan pengendalian intern selama ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan. Mengacu pada peraturan tersebut, Kementerian Keuangan berkomitmen untuk menjaga keandalan dan kewajaran penyajian LK BA015 dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 pada tanggal 13 Februari 2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Implementasi PIPK harus dilaksanakan sedera menyeluruh oleh seluruh entitas akuntansi dan entitas pelaporan penyusun LKPP, mulai dari entitas akuntansi tingkat paling bawah sampai dengan entitas pelaporan yang

melakukan konsolidasi LKPP, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Selanjutnya untuk setiap entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, PIPK harus dirancang dan diimplementasikan pada tingkat entitas dan tingkat proses/transaksi. APIP sebagai *reviewer* PIPK, harus menjalankan fungsi revidi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kenaikan atau penurunan penerapan unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian internal atas pelaporan keuangan secara signifikan dan secara langsung mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan secara keseluruhan.

Hasil analisis tersebut sejalan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Herawati (2014), Kustiawan (2016), serta Kiranayanti dan Erawati (2016) yang menyatakan bahwa Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Pengaruh Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Auditor Eksternal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil kuesioner yang diperoleh dari responden menunjukkan bahwa untuk variabel pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor eksternal, skor kumulatif maksimal yang diperoleh adalah 20 dan skor minimal yang diperoleh adalah 12 dengan skor rata-rata kumulatif sebesar 16,98. Hasil statistika deskriptif tersebut menguatkan hasil uji hipotesis (H2), yang menunjukkan bahwa rata-rata responden memberi jawaban positif atas pernyataan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor eksternal mendukung kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa; 1) pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan auditor eksternal; 2) pemberian penjelasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam jangka waktu 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterima; 3) penjelasan dan dokumen pendukung tindak lanjut yang cukup, kompeten, dan relevan serta telah diverifikasi oleh aparat pengawasan intern; 4) penilaian status tindak lanjut dengan status sesuai rekomendasi oleh BPK RI; secara signifikan dan secara langsung mempengaruhi kualitas Laporan

Keuangan Kementerian Keuangan secara keseluruhan.

Komitmen Para Pimpinan dalam penyelesaian tindak lanjut atas LHP LK BA015 Kementerian Keuangan, dapat menjadi aspek integral dalam mendorong peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan. Komitmen tersebut diwujudkan dengan diperhitungkannya IKU persentase penyelesaian tindak lanjut atas LHP LK BA015 dengan target penyelesaian di tahun 2018 secara kumulatif sebesar 89%. Pencapaian IKU yang dibobot menjadi 2, sebesar 80% dari pencapaian atas penyelesaian tindak lanjut LK, dan sebesar 20% atas pencapaian penyelesaian tindak lanjut kinerja dan PDTT membuktikan besarnya atensi Pimpinan untuk bersama menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan dan memperbaiki kelemahan yang ada.

Pelaksanaan pembahasan antara tiga pihak antara Inspektorat Jenderal, Unit Eselon I dan BPK RI untuk menyampaikan tindak lanjut dapat dipersiapkan dengan lebih matang dan melibatkan partisipasi aktif Unit Eselon I terkait. Diperlukan koordinasi dalam persiapan pembahasan dengan melakukan pertemuan rutin untuk membahas *progress* kemajuan pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun. Dengan begitu, Koordinator

Tindak Lanjut dapat selalu ter-*update* dengan *progress* dan kendala yang dihadapi untuk kemudian dicarikan solusi atas permasalahan tersebut.

Hasil analisis yang telah disebutkan di atas selaras dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Sari, dkk (2015), serta Tresnawati dan Apandi (2016) yang menyatakan bahwa Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Auditor Eksternal berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Simpulan

Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah; 1) implementasi sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi implementasi sistem pengendalian intern pemerintah, maka kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan yang dihasilkan pun akan semakin meningkat, namun sebaliknya jika implementasi sistem pengendalian intern pemerintah semakin rendah, maka kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan yang dihasilkan pun akan semakin menurun; 2) pelaksanaan tindak

lanjut hasil pemeriksaan Auditor Eksternal berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Auditor Eksternal, maka kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan yang dihasilkan pun akan semakin meningkat, namun sebaliknya jika pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Auditor Eksternal semakin rendah, maka kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan yang dihasilkan pun akan semakin menurun.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang dialami pada penelitian ini adalah responden yang diperoleh berasal dari level *low to middle management* sehingga penelitian ini terbatas pada pemahaman responden pada saat penelitian dilakukan dan belum dapat merepresentasikan keadaan organisasi seutuhnya.

Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah; 1) bagi Kementerian Keuangan diperlukan komitmen dalam penerapan pengendalian intern secara keseluruhan di masing-masing Unit Eselon

I Kementerian Keuangan. Selain itu, diperlukan fokus dan prioritas dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Auditor Eksternal. Dengan semakin baiknya implementasi pengendalian intern dan komitmen penyelesaian tindak lanjut, kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan akan semakin baik; 2) bagi Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) diharapkan dapat menjadi contoh dalam upaya peningkatan kualitas pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain itu, sebagai organisasi yang berperan sebagai Koordinator Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Auditor Eksternal, Inspektorat Jenderal dapat merumuskan strategi untuk mendorong penyelesaian tindak lanjut di lingkungan Kementerian Keuangan; 3) bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan dapat memasukkan faktor-faktor lain yang belum termasuk dalam variabel dalam penelitian ini. serta disarankan untuk melakukan penelitian dalam lingkup Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/Pemerintah Secara Keseluruhan untuk kemudian mendapatkan kesimpulan yang lebih komprehensif dan dapat dibandingkan hasilnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, I., dan Fitriyani, D. (2014). *Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, Karakteristik Organisasi dan Hasil Audit BPK*. Simposium Nasional Akuntansi XVII. Mataram.
- Donaldson, L., & Davis, J.H. 1989. CEO Governance And Shareholder Returns: Agency Theory Or Stewardship Theory. *Paper presented at the annual meeting of the Academy of Management*. Washington, DC.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. 1991. Stewardship Theory Or Agency Theory: Ceo Governance And Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16: 49-64.
- Financial Accounting Standard Board. (2010). *Statement of Financial Concepts*. Stamford. Connecticut.
- Fransiska. (2015). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komitmen Organisasi terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhan Batu). Universitas Riau. Pekanbaru.
- Herawati, Tuti. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). *Study and Accounting Research* Vol.XI, No. 1 – 2014.
- Kustiawan, Memen. (2016). Pengaruh Pengendalian Intern Dan Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Yang Berimplikasi Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi*/Volume XX, No. 03.
- Martani D., dan Liestiani, A. (2012). *Disclosure in Local Government Financial Statement: the Case of Indonesia*. *Global Review of Accounting & Finance*, Vol 3. No.1.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moeller, R. R. (2009). *Brink's Modern Internal Auditing: A Common Body of Knowledge*. John Wiley & Sons; New Jersey .
- Mokoginta, Novtania, Linda Lambey, dan Winston Pontoh. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2), 2017, 874-890.
- Munawar, Nadirsyah dan S. Abdullah. 2016. Pengaruh Jumlah Temuan Audit atas SPI dan Jumlah Temuan Audit

- atas Kepatuhan terhadap Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi* Vol.5 No.2:57-67.
- Sari, Martani, dan Setyaningrum. (2015). Pengaruh Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Opini Audit melalui Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. *Research Gate*.
- Tresnawati, F. dan R. N. N. Apandi. (2016). Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Kementerian/Lembaga Republik Indonesia). *Jurnal Akuntansi Riset* Vol. 5 No. 2:1-12.